

PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP OMSET UMKM KOTA PADANG

Yenni Del Rosa, Idwar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas Padang

Abstract: *The purpose of this study was to determine the effect of inflation and interest rates on the UMKM turnover in Padang. The research method uses secondary data in the form of panel data in 2009 - 2018 obtained through library research. The research data were processed using inferential statistics by testing hypotheses partially and simultaneously. The results of multiple linear regression obtained $Y = 128737,876 - 1177,219X_1 - 137818,434X_2 + e$ where inflation and interest rates have a significant negative effect on MSME turnover in Padang city partially and simultaneously. Inflation and interest rates correlated with MSME turnover is very strong (91%) and MSME turnover can be explained by inflation and interest rates of 80.2% while the remaining 19.8% is explained by other factors not included in the research model.*

Keywords: *inflation, interest rates and MSME turnover*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga terhadap omset UMKM di Padang. Metode penelitian menggunakan data sekunder berupa data panel pada tahun 2009 - 2018 yang diperoleh melalui studi pustaka. Data penelitian diolah menggunakan statistik inferensial dengan menguji hipotesis secara parsial dan simultan. Hasil regresi linier berganda diperoleh $Y = 128737,876 - 1177,219X_1 - 137818,434X_2 + e$ dimana inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap omset UMKM di kota Padang secara parsial dan simultan. Tingkat inflasi dan suku bunga berkorelasi dengan omset UMKM sangat kuat (91%) dan omset UMKM dapat dijelaskan oleh inflasi dan tingkat bunga 80,2% sedangkan sisanya 19,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Kata kunci: inflasi, suku bunga, dan omset UMKM

A. PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi perekonomian Indonesia sangat urgen dimana UMKM mampu menyerap tenaga kerja sekitar 97% dari semua tenaga kerja nasional dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 57% (Bank Indonesia, 2018). UMKM terbukti tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi tahun 1997 – 1998 dan tetap mampu berdiri kokoh. Namun demikian persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih melekat pada UMKM. Pemerintah mencatat dari 56,4 juta UMKM di seluruh Indonesia baru sekitar 30% yang mampu mengakses pembiayaan, sekitar 76,1% mendapat kredit dari bank dan 23,9% mengakses dari non bank termasuk usaha simpan pinjam seperti koperasi. Dengan kata lain sekitar 60% - 70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan. Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan BI No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberian kredit oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam pengembangan UMKM yang mewajibkan perbankan mengalokasikan kredit kepada UMKM mulai tahun 2015, sebesar 5% tahun 2016, sebesar 10% tahun 2017 dan sebesar 20% akhir tahun 2018.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar hampir mencapai Rp 15.000,- saat ini berdampak cukup besar pada perekonomian Indonesia terutama bagi pelaku UMKM yang menggunakan bahan baku impor sehingga makin mahalnya bahan baku produksi. Kondisi pelemahan nilai rupiah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terutama terhadap kondisi *profit margin*. Pelemahan rupiah juga akan meningkatkan inflasi terutama bahan pangan sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat.

Penurunan daya beli masyarakat dihadapkan dengan biaya produksi yang semakin tinggi untuk produsen berbahan baku impor sehingga akan menurunkan profit dan penghasilan. Kondisi ini juga akan dirasakan oleh UMKM yang kegiatan produksinya tidak menggunakan bahan baku impor. Meskipun biaya produksi tidak meningkat, pelaku UMKM tidak mampu mengontrol penurunan daya beli konsumen yang terjadi akibat meningkatnya harga barang produksi lainnya. Belum lagi bila modal UMKM berasal dari pinjaman yang sangat terikat pada kondisi suku bunga pinjaman yang cukup rawan terhadap kondisi makro. Jika kondisi ini dibiarkan atau tidak diselesaikan dengan tepat maka tidak menutup kemungkinan akan banyak UMKM yang gulung tikar atau berhenti produksi sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan beresiko meningkatkan angka pengangguran. Menurut (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2018) hingga saat ini tercatat penurunan omset rata-rata 15% untuk UMKM berbasis bahan baku impor.

Pemerintah harus mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM saat ini. Beberapa hal yang sering menjadi kendala UMKM berhubungan dengan penguasaan teknologi dan akses pasar serta permodalan dimana masalah modal selalu menjadi masalah utama yang sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Dalam kondisi ini pemerintah seharusnya fokus untuk mempermudah akses pinjaman secara merata dan terus menyediakan fasilitas pinjaman usaha dengan bunga rendah untuk mempertahankan kinerja dan produktivitas UMKM di tengah goncangan pelemahan nilai mata uang saat ini seperti melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebenarnya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM dalam kondisi seperti ini dengancara memperkuat daya saing produk, meningkatkan produktivitas dan mengeksport produknya. Untuk mendukung tumbuhnya UMKM terutama dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, pemerintah perlu mengontrol tingkat inflasi, menjaga suku bunga kredit khususnya melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Pelemahan nilai rupiah masih menimbulkan kekhawatiran terutama dampak terhadap utang luar negeri yang harus dibayar. Posisi cadangan devisa pada Januari 2019 sebesar 120,1 milyar dollar AS dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2018 sebesar 120,7 milyar dolar AS. Bank Indonesia menyatakan posisi cadangan devisa tersebut cukup tinggi dan setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia menilai penurunan cadangan devisa pada Januari 2019 terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kedepan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang cukup baik serta kinerja ekspor yang tetap positif.

Akhir Desember 2018 lalu cadangan devisa Indonesia mencapai 120,7 milyar dollar AS. Angka ini lebih besar dari akhir November 2018 sebesar 117,2 milyar dollar AS. Setelah sebelumnya cadangan devisa Indonesia pada September 2018 sempat tergerus hingga 114,8 milyar dollar AS turun menjadi 3,1 milyar dollar AS jika dibandingkan pada Agustus 2018 di angka 117,9 milyar dollar AS. Walaupun pemerintah sudah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing *dual currency* senilai 1 milyar dollar AS dan 1 milyar Euro tapi hal itu belum bisa mengkompensasi penurunan cadangan devisa untuk intervensi rupiah yang dilakukan oleh otoritas moneter. Saat ini BI masih melihat pelemahan rupiah yang terjadi hanya bersifat sementara sehingga BI belum melakukan penyesuaian kebijakan suku bunga. Berdasarkan uraian fenomena di atas dapat dilihat fluktuasi inflasi, suku bunga dan omset UMKM kota Padang seperti pada tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1.

Inflasi, Suku Bunga dan Omset UMKM Kota Padang (%) Tahun 2009 - 2018

Variabel Penelitian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi	0,24	0,58	0,35	0,54	0,55	0,47	0,83	1,13	0,48	0,19

Suku bunga	1.01	1,24	0.46	1.02	1,02	1,11	1,09	1,13	1,19	1,17
Omset UMKM	5.12	18.2 3	20.9 5	40.1 6	33,21	35,5 2	41,1 3	47,2 6	39,7 1	42,17

Sumber :Bank Indonesia dan BPS, 2018

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah penelitian sbb : Bagaimanakah pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap omset UMKM kota Padang secara parsial dan simultan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap omset UMKM kota Padang secara parsial dan simultan ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnis sehingga menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut (BPS, 2018) UMKM dikelompokkan atas 3 jenis yaitu sbb : 1) usaha mikro jumlah karyawan 10 orang, 2) usaha kecil jumlah karyawan 30 orang, 3) usaha menengah jumlah karyawan lebih 30 orang. Dalam perspektif usaha UMKM diklasifikasikan atas 4 kelompok sbb : 1) UMKM sektor informal, 2) UMKM mikro adalah UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya, 3) usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (sub kontrak) dan ekspor, 4) *fast moving enterprise* yaitu UMKM yang mempunyai kewirausahaan cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. Undang-Undang No. 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa sebuah perusahaan digolongkan UMKM bila perusahaan kecil yang dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Tabel 2.1 memperlihatkan karakteristik UMKM dan usaha besar.

Tabel 2.1. Karakteristik UMKM dan Usaha Besar

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Kecil	1. Jenis barang/komoditi umumnya tidak gampang berubah
	2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap
	3. Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan sederhana
	4. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga
	5. Sudah membuat neraca usaha
	6. Sudah memiliki izin usaha dan legalitas lainnya termasuk NPWP
	7. Pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha
	8. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal
	9. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha/ <i>business planning</i>
	10. Contoh : pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya
Usaha Menengah	1. Memiliki manajemen organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas
	2. Telah menerapkan sistem akuntansi untuk auditing dan penilaian oleh perbankan
	3. Telah melakukan aturan organisasi perburuhan
	4. Sudah memiliki persyaratan legalitas
	5. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
	6. Telah memiliki sumberdaya manusia yang terlatih dan terdidik

	7. Contoh : usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan
Usaha Besar	1. Usaha ekonomi produktif dilakukan oleh badan usaha dengan hasil penjualan lebih besar dari usaha menengah meliputi BUMN/BUMS, usaha patungan, usaha asing

Sumber : BPS, 2018.

Berdasarkan tabel 2.1 di atas kriteria UMKM dapat ditentukan sesuai tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2. Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha kecil	> Rp 50 juta – Rp 500 juta	>Rp 300 juta – Rp 2.5 milyar
Usaha menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 milyar	>Rp2,5 milyar – Rp 50 milyar
Usaha besar	>Rp 10 milyar	>Rp 50 milyar

Sumber : BPS, 2018

Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain sbb : 1) Kualitas belum standar, 2) Desain produk terbatas, 3) Jenis produk terbatas, 4) Kapasitas dan harga produknya terbatas, 5) Bahan baku kurang standar, 6) Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurang sempurna.

UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia seperti tabel 2.3

Tabel 2.3. Aspek Lingkungan Strategis UMKM

Aspek Politik	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial
Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC yang akan menciptakan peluang baru bagi UMKM	1. Kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB 2. Pengembangan UMKM hanya butuh tingkat investasi lebih rendah	1. Sektor UMKM lebih menjamin stabilitas pasar tenaga kerja 2. Penekanan pengangguran jadi wahana bangkitnya wirausaha baru

Sumber :Kementerian Koperasi dan UMKM, 2016

Berdasarkan tabel 2.3 di atas bisnis UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena : 1) berkedudukan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi berbagai sektor, 2) penyedia lapangan kerja terbesar, 3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, 4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, 5) penyumbang neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor

2.2. Definisi Inflasi

Inflasi yaitu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus (Samuelson, 2004) berarti kenaikan harga yang terjadi karena faktor musim. Untuk mengukur perubahan angka inflasi dari waktu ke waktu umumnya digunakan angka indeks yang disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Perubahan angka indeks dari waktu ke waktu yang lain dinyatakan dalam angka persentase yaitu besarnya angka inflasi dalam periode tersebut. Perkembangan kenaikan harga sejumlah barang/jasa secara umum dalam periode waktu ke waktu disebut laju inflasi yang dinyatakan dalam angka persentase.

Laju inflasi dapat terjadi pada tingkat ringan, sedang, berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi bila kenaikan harga di bawah 10%, inflasi sedang antara 10% – 30%, inflasi berat antara 30% - 100% per tahun dan hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali terjadi bila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Angka inflasi tersebut umumnya bersifat relatif dan tidak ada standar umum. Secara garis besar ada 3 teori inflasi (Samuelson, 2004) yaitu sbb :

1 .Teori Kuantitas

Prinsipnya mengatakan bahwa timbulnya inflasi karena bertambahnya jumlah uang beredar dan prediksi masyarakat bahwa harga akan naik bukan disebabkan oleh faktor lain. Cara mengatasi inflasi dengan menghilangkan (mengurangi jumlah uang beredar).

2.Teori Keynes

Menurut teori ini inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia dan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonomisnya sehingga harga barang secara umum naik. Jika hal ini terus terjadi maka selama itu pula proses inflasi akan berlangsung. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah : 1) Pemerintah yang mencetak uang baru untuk menutupi defisit anggaran belanja negara, 2) Pengusaha swasta yang menambah investasi baru dengan kredit dari bank, 3) Pekerja / serikat buruh yang menuntut kenaikan upah melebihi pertambahan produktivitas.

3 .Teori Strukturalis

Teori strukturalis (teori inflasi jangka panjang) menyorot penyebab inflasi berasal dari struktur ekonomi khususnya *supply* bahan makanan dan barang ekspor. Pertambahan produksi barang tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan akibatnya terjadi kenaikan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Selanjutnya kenaikan harga barang yang merata menyebabkan inflasi yang terjadi dapat diatasi dengan mengurangi jumlah uang beredar tapi harus diatasi dengan peningkatan produktivitas dan pembangunan sektor bahan makanan dan barang ekspor.

Penyebab Inflasi

Terjadinya inflasi dalam perekonomian negara disebabkan oleh faktor sbb : 1) Kenaikan permintaan *aggregate (demand pull inflation)*, 2) Kenaikan biaya produksi(*cost push inflation*) Dampak inflasi terhadap perekonomian suatu negara sbb :1) berkurangnya investor, 2) mendorong tingkat suku bunga, 3) mendorong tingkat spekulatif, 4) ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang, 5) daya saing produk nasional berkurang, 6) defisit neraca pembayaran, 7) kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak inflasi terhadap masyarakat adalah sbb : 1) penghasilan masyarakat tetap, 2) memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan, 3) menguntungkan para spekulan, 4) mempengaruhi para pelaku ekonomi.

Inflasi merupakan masalah serius bagi kestabilan perekonomian suatu negara. Bila inflasi tidak segera diatasi akan menimbulkan naiknya harga barang, turunnya nilai mata uang, meningkatnya pengangguran dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Penyebab inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang beredar (Nofirin, 1992) di sisi lain jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat juga penyebab timbulnya inflasi. Dalam hal ini kebijakan sangat dibutuhkan dalam mengatasi inflasi terutama berhubungan dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan non moneter yaitu kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah dan jumlah uang beredar. Cara ini merupakan alternatif untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan dengan cara sbb : 1) Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya, 2) Menekan tingkat upah, 3) Pemerintah melakukan pengawasan harga dan menetapkan harga maksimal, 4) Pemerintah melakukan distribusi secara langsung, 5) Mengatasi *hyperinflation* dengan melakukan pemotongan nilai mata uang

2.3. Definisi Suku Bunga

Bunga merupakan ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga berarti penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya (Dornbusch,

1994). Suku bunga merupakan biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut dinyatakan dalam persentase per tahun (Nopirin, 1992).

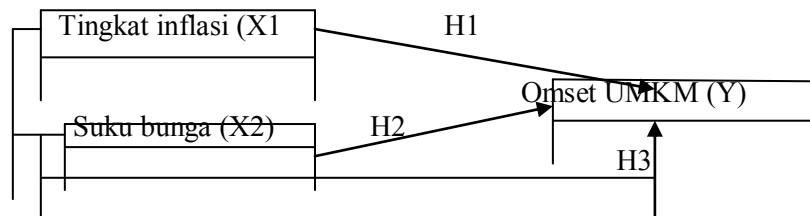
Tingkat suku bunga salah satu indikator moneter yang berdampak pada beberapa kegiatan perekonomian sebagai berikut :1) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, 2) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan pemilik modal dalam berinvestasi pada *real assets* atau *financial assets*, 3) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya, 4) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi nilai uang beredar.

Bunga yang terdapat pada bank konvensional dapat dipisahkan atas bunga simpanan dan bunga pinjaman dimana bunga ini merupakan pendapatan dan beban utama bagi bank. Bunga kredit merupakan komponen utama pendapatan bank. Penyaluran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh bank menempati porsi terbesar dalam aktiva bank. Sementara pada sisi pasiva, kewajiban yang berasal dari dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar. Biaya yang berasal dari bunga simpanan dana pihak ketiga merupakan biaya paling besar yang ditanggung oleh bank. Bunga pinjaman dan bunga simpanan mempunyai keterkaitan sangat erat. Jika suku bunga simpanan naik maka kenaikan suku bunga simpanan akan berpengaruh pada kenaikan suku bunga kredit. Bunga simpanan dan kredit akan saling mempengaruhi dalam industri perbankan.

2.4. Kerangka Pemikiran

Usaha Mikro Kecil Menengah butuh modal berupa pinjaman dari bank umum selalu terkait dengan pembayaran bunga yang berfluktuasi serta dipengaruhi oleh tingkat inflasi sehingga omset yang diperoleh UMKM dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan suku bunga. Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian



2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya (Sekaran, 2006). Reaksi UMKM terhadap inflasi karena kondisi makro ekonomi merupakan hal penting dalam meningkatkan omset UMKM. Meskipun inflasi cukup tinggi tapi pemerintah hanya menetapkan pajak UMKM sebesar 0,5% sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk menjaga agar UMKM tetap bertahan di tengah krisis ekonomi yang terjadi. Hipotesis alternatif pertama (HA_1) dirumuskan sebagai berikut : diduga inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap omset UMKM kota Padang.

Kenaikan biaya produksi akibat inflasi juga berdampak terhadap suku bunga sehingga biaya yang dikeluarkan UMKM meningkat dan menurunkan profitabilitas. Kenaikan biaya produksi memicu kenaikan harga barang / jasa yang dihasilkan sehingga kemampuan daya beli masyarakat akan menurunkan laba. Pemilik UMKM akan cepat bereaksi jika terjadi kenaikan suku bunga pinjaman untuk mencapai suku bunga ekuilibrium baru sehingga tercapai tingkat harga barang / jasa tertentu yang membuat omset UMKM meningkat. Hipotesis alternatif kedua (HA_2) dirumuskan sebagai berikut : diduga suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap omset UMKM. Hipotesis alternatif pertama dan kedua di atas merupakan hipotesis penelitian secara parsial. Hipotesis alternatif ketiga (HA_3) secara simultan diduga inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap omset UMKM dan suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap omset UMKM.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *event study* untuk mengukur reaksi pasar terhadap inflasi dan suku bunga. Jenis data yang digunakan data sekunder berupa data panel. Penelitian menggunakan variabel terikat omset UMKM dan variabel bebas inflasi serta suku bunga dengan definisi operasional variabelnya seperti tabel 3.1.

Tabel 4.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Variabel	Satuan
Omset UMKM (Y) adalah kenaikan kapasitas produksi UMKM berupa persentase kenaikan pendapatan UMKM	%
Inflasi (X1) adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu	%
Suku bunga (X2) adalah harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu selama setahun	%

Desain penelitian menggunakan *ex post facto* (Sekaran, 2015) dengan meneliti sesuatu fakta yang telah terjadi di lapangan berupa pendekatan kuantitatif deskriptif terdiri dari lima komponen ilmiah sebagai berikut : teori, hipotesis, observasi, generalisasi empiris dan penerimaan atau penolakan hipotesis. Karakteristik penelitian kuantitatif sbb : fenomena digambarkan secara numerik, analisis data berupa statistik deskriptif dan inferensial, hipotesis spesifik, besar sampel dan validitas statistik secara akurat merefleksikan populasi.

Tahap penelitian kuantitatif deskriptif sebagai berikut : 1) pemaparan latar belakang, 2) rumusan masalah penelitian, 3) menjelaskan tujuan penelitian, 4) menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, 5) menjelaskan metode penelitian (Sekaran, 2015).

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian dalam hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan perlu diuji secara empiris. Data sekunder berupa data panel tahun 2009 – 2018 diperoleh melalui *library research* dari Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Dinas UMKM kota Padang.

Analisis data menggunakan regresi linier berganda yaitu regresi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas (Juanda, 2012) dengan model $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ dimana Y = omset UMKM, X_1 = inflasi, X_2 = suku bunga, a = konstanta, b = koefisien regresi variabel X_1, X_2 dan e = *error term*. Koefisien Determinasi(KD) mengukur berapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas tapi memiliki kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas dalam model regresi dimana dalam setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R^2 meskipun nilai yang dimaksudkan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi bias tersebut digunakan *Adjusted R²* dimana KD telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Nilai *Adjusted R²* dapat berfluktuasi karena penambahan variabel baru dalam model. Dalam uji empiris jika nilai *Adjusted R²* negatif maka nilai *adjusted R²* dianggap nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$ maka *Adjusted R²* = 1 sedangkan jika nilai $R^2 = 0$ maka *Adjusted R²* = $(1 - k) / (n - k)$. Jika $k > 1$ maka *Adjusted R²* bernilai negatif (Suliyanto, 2011).

Uji t bertujuan menguji kebeartian koefisien regresi secara parsial dengan membandingkan t hitung dan t tabel pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ (Suliyanto, 2011). Uji t berpengaruh signifikan jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ atau probabilitas kesalahan $< 5\%$ ($P < 0,05$) dan sebaliknya berpengaruh tidak signifikan jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau probabilitas kesalahan $> 5\%$ ($P > 0,05$). Uji F bertujuan menguji kebeartian koefisien regresi secara simultan dengan membandingkan F hitung dan F

tabel pada taraf nyata $\alpha = 0.05$ (Suliyanto, 2011). Uji F berpengaruh signifikan jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau probabilitas kesalahan $< 5\%$ ($P < 0,05$) dan sebaliknya berpengaruh tidak signifikan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas kesalahan $> 5\%$ ($P > 0,05$).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum UMKM Kota Padang

Kota Padang merupakan ibu kota provinsi Sumatera barat sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat. Kota Padang salah satu sentral bisnis dengan jumlah UMKM lebih banyak dari kabupaten lain di Sumatera Barat. Berdasarkan data (Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang, 2018) jumlah UMKM di kota Padang meningkat dari 76.236 buah tahun 2017 menjadi 78.298 buah tahun 2018 dengan peningkatannya sebanyak 2.062 buah per tahun dengan jumlah pelaku UMKM seperti pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Pelaku UMKM Kota Padang Tahun 2014 – 2018

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
2014	558	25.606	12.260	38.424
2015	500	25.690	12.580	38.770
2016	808	38.634	34.620	74.062
2017	950	39.403	35.883	76.236
2018	1.293	40.443	36.570	78.298

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2019

Dari berbagai jenis UMKM salah satu UMKM yang berpotensi berkembang adalah UMKM jenis kuliner dimana jumlah UMKM kuliner meningkat dari 4.809 buah tahun 2017 menjadi 5.176 buah tahun 2018. Untuk lebih jelasnya jumlah UMKM per kecamatan kota Padang tahun 2015 – 2018 seperti tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2. Jumlah UMKM Per Kecamatan Kota Padang

No.	Kecamatan	Jumlah			
		2015	2016	2017	2018
1.	Padang Barat	9.229	9.429	9.629	9.9929
2.	Padang Timur	5.352	5.552	5.752	6.022
3.	Padang Selatan	5.813	6.053	6.288	6.618
4.	Koto Tengah	6.824	7.060	7.300	7.660
5.	Lubuk Begalung	7.002	7.357	7.657	8.077
6.	Pauh	3.492	3.672	3.853	4.122
7.	Lubuk Kilangan	6.334	6.474	6.614	6.824
8.	Kuranji	12.169	12.349	12.529	12.799
9.	Padang Utara	5.395	5.535	5.675	5.885
10.	Nanggalo	7.395	7.471	7.591	7.725
11.	Bungus Teluk Kabung	5.101	5.221	5.341	5.521
	Total	74.062	76.173	78.229	81.182

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang, 2019

Jumlah UMKM per kecamatan kota Padang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan totalnya 81.182 buah unit usaha. Jumlah UMKM terbanyak kota Padang berada di kecamatan Kuranji dengan jumlah mencapai lebih dari 12.000 UMKM dan paling sedikit di kecamatan Pauh hanya berjumlah 4.122 UMKM. Berdasarkan tabel di atas terbukti UMKM dapat menjaga eksistensinya dalam perekonomian kota Padang sejak saat krisis moneter tahun 1998 yang lalu. Saat krisis moneter terjadi hanya UMKM yang mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar karena mayoritas UMKM tidak selalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar negeri. Saat terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah, perusahaan berskala besar paling potensi mengalami imbas dari krisis moneter yang berhubungan dengan nilai valuta asing. Sejak saat itu pemerintah mulai menyadari betapa besar dan pentingnya

peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia. Selain itu UMKM juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun UMKM berperan penting dalam perekonomian tapi juga memiliki keterbatasan dan kendala sbb : 1) rendahnya kemampuan akses pada sumber-sumber informasi, 2) rendahnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar, 3) rendahnya kemampuan dan akses terhadap sumber-sumber permodalan termasuk perbankan, 4) rendahnya kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi, 5) rendahnya kemampuan dalam mengembangkan organisasi dan manajemen. Keenam, lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan antara sesama usaha kecil dan besar.

Berdasarkan kendala di atas pemberdayaan merupakan langkah tepat untuk mengatasinya. Selain itu melalui pemberdayaan UMKM juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi sbb : 1) *enabling* yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan agar potensi masyarakat dapat berkembang, 2) *powering*, yaitu dengan memperkuat sumber daya yang dimiliki masyarakat, 3) *protecting* yaitu proses pemberdayaan harus melindungi dan mencegah agar yang lemah tidak bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan untuk mengembangkan UMKM tidak bisa hanya fokus pada permodalan saja tapi juga harus berorientasi pada semua aspek yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja UMKM seperti potensi sumber daya manusia. Pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mengurangi kelemahan pada UMKM sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Dengan kapasitas permodalan yang cukup, akses yang luas terhadap investor, sumber bahan baku dan calon konsumen serta memiliki daya saing yang tinggi sehingga nantinya terjadi peningkatan sumber daya yang dimiliki masing-masing UMKM dengan bertambahnya pendapatan melalui kinerja usaha UMM.

Berdasarkan PP No. 17 tahun 2013 pasal 5 dijelaskan bahwa pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui : 1) pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi, 2) penyusunan program pembinaan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi, 3) pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan, 4) pemantauan dan pengendalian program. Hal ini menjelaskan bahwa pemberdayaan dan pengembangan UMKM dilaksanakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai PP No. 17 tahun 2015 menunjukkan besarnya peranan pemerintah dalam mengembangkan UMKM meskipun kenyataannya UMKM mampu berkembang secara mandiri.

Penetapan produk unggulan daerah oleh setiap Pemda perlu didukung oleh langkah pengembangan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Dengan berkembangnya komoditi unggulan daerah membuka peluang berkembangnya UMKM di daerah tersebut dimana penetapan komoditi unggulan ditetapkan berdasarkan potensi, kondisi sosial ekonomi dan budaya daerah. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan kunci penciptaan sumber ekonomi baru di Indonesia. Potensi yang dimiliki UMKM dapat mendukung penyerapan tenaga kerja khususnya perempuan. UMKM dapat meningkatkan potensi budaya dan pariwisata Indonesia sekaligus menjaga kelestarian citra budaya daerah. Untuk itu pengembangan UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan ekspor maka UMKM selalu menjadi prioritas bagi berbagai kementerian, lembaga dan pihak-pihak terkait lainnya. UMKM dipercaya memiliki ketahanan ekonomi atau resiliensi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.

UMKM saat ini memiliki peran besar bagi perekonomian Indonesia sehingga UMKM dinilai berdampak luas untuk menggerakkan roda perekonomian. Karena jumlahnya sangat mendominasi maka UMKM merupakan *backbone* dari ekonomi Indonesia. Jika tidak ada UMKM maka Indonesia akan sulit menggerakkan roda perekonomian. Data terbaru menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 62 juta dengan berbagai spesialisasi usaha. Karena itu tidak salah jika UMKM mempunyai andil cukup besar dalam perekonomian Indonesia saat ini. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat perlu sumber ekonomi baru di samping sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan.

Sektor pertanian di Sumatera Barat sudah sangat sulit dikembangkan di tengah keterbatasan lahan sehingga pertanian dan perikanan lahannya sudah tidak ada. UMKM berperan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mampu memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat terutama di daerah pedesaan. Faktor penentu agar UMKM dapat bersaing dilihat dari segi mengembangkan produk unik dan fleksibilitas dalam mengadopsi teknologi baru serta harus mampu mengelola sumber daya dengan baik (Ismail, 2013).

4.2. Hasil dan Analisis Data

Hasil olahan data pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap omset UMKM kota Padang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1287372.879	137160.018		8.879	.000
Inflasi	-1177.219	1537.106	-.079	-.716	.673
Suku Bunga	-137818.434	16467.737	-.777	-8.603	.719
Omset UMKM	8.713	5.072	.175	1.817	.060

a. Dependent Variable : Omset UMKM

Berdasarkan tabel 4.3 didapat persamaan regresi linier berganda $Y = 1287372.878 - 1177.219 X_1 - 137818.434 X_2 + e$ dengan interpretasinya sebagai berikut :

- $a = 1287372.879$ berarti jika inflasi dan suku bunga nol persen maka omset UMKM sebesar 1287372.879 persen.
- $b_1 = - 1177.219$ berarti jika inflasi naik satu persen maka omset UMKM turun sebesar 1177.219 persen dengan asumsi suku bunga *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi bahwa inflasi akan berpengaruh terhadap harga jual produk dan biaya produksi sehingga penjualan (omset UMKM) akan turun.
- $b_2 = -137818.434$ berarti jika suku bunga naik satu persen maka omset UMKM turun sebesar 137818.434 persen dengan asumsi inflasi *ceteris paribus*.

Uji parsial pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap omset UMKM ($0.673 > 0.05$) dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap omset UMKM ($0.719 > 0.05$).

Tabel 4.4. ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.
1 Regression	4.165E10	3	1.794E10	33.511	0.000 ^a
Residual	7.519E9	20	5.209E8		
Total	5.799E10	23			

a. Predictors : (Constant), Omset UMKM, Suku Bunga dan Inflasi

b. Dependent Variable : Omset UMKM

Uji simultan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap omset UMKM ($33.511 > 0.000$). Selanjutnya seperti tabel 4.5 korelasi inflasi, suku bunga dengan omset UMKM kota Padang 91% (sangat kuat) dan inflasi serta suku bunga mampu menjelaskan omset UMKM kota Padang 80,2% sedangkan sisanya 19,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian seperti investasi, nilai mata uang, pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya.

Tabel 4.5. Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 ^a	.828	.802	21573.35250

a. Predictors : (Constant), Omset UMKM, Suku Bunga, Inflasi

Sesuai hukum permintaan jika jumlah barang yang tersedia tidak mencukupi permintaan maka harga barang yang dijual oleh UMKM akan naik karena kenaikan biaya produksi. Saat biaya produksi barang naik maka harga penawaran barang akan turut naik sehingga berdampak naiknya harga dan menyebabkan inflasi. Inflasi dapat menyebabkan penetapan harga pokok terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Karena persentase inflasi tidak teratur, kita tidak dapat memastikan berapa persen inflasi untuk masa tertentu. Akibatnya penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Keadaan inflasi ini dapat mengganggu perekonomian terutama produsen sebagai pemilik UMKM. Terjadinya inflasi sering berdampak buruk pada omset UMKM sehingga pemilik UMKM harus mencari pendapatan tambahan dengan menciptakan inovasi pada berbagai produk UMKM. Inflasi yang terjadi dapat merubah pendapatan (omset) UMKM yang bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi, inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong para pengusaha UMKM memperluas produksinya. Dengan demikian akan tercipta kesempatan kerja sekaligus bertambahnya pendapatan pemilik UMKM. Jika melihat perspektif masyarakat Indonesia, inflasi seringkali merugikan masyarakat tingkat bawah sehingga timbul kecemasan terhadap pemerintah yang membuat kebijakan kurang tepat yang menyebabkan inflasi terus naik. Inflasi sekecil apapun seringkali menimbulkan masalah. Oleh sebab itu peranan pemerintah untuk mengintervensi kebijakan, maka pemerintah harus menyediakan kebutuhan masyarakat yang merata untuk semua masyarakat Indonesia.

Jika melihat *trend* yang ada target inflasi 4% tahun ini tercapai dengan catatan harga kebutuhan pokok tetap dijaga. Apalagi setiap penghujung tahun bulan Desember kenaikan harga kerap terjadi jelang Natal dan Tahun Baru. Selain besaran inflasi bulanan, tahun kalender maupun tahunan yang secara umum terkendali, kita perlu juga menyikapi inflasi inti sebagai komponen inflasi cenderung dalam pergerakan inflasi, ditentukan oleh interaksi permintaan penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi dari produsen dan konsumen. Inflasi inti penting karena menggambarkan daya beli dan permintaan masyarakat. Berkaitan dengan upaya menjaga daya beli, pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus permintaan masyarakat agar daya beli masyarakat dari sisi UMKM meningkat. Tantangan yang dihadapi UMKM seiring pelemahan daya beli masyarakat masih sangat besar karena sebagian pelaku UMKM telah beralih ke perdagangan *daring*. Disamping itu juga UMKM belum mampu untuk menciptakan pemasaran efektif karena tidak mudah untuk beralih dari *platform* usaha ke *platform* lainnya. Pemerintah sudah menurunkan pajak UMKM hanya sebesar 0,5% sesuai PP No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemberlakuan PP ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penetapan tarif baru ini beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi. Selain itu PP ini juga diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai ketentuan UU pajak penghasilan. Keuntungan PPh UMKM 5% sbb :

- UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana karena perhitungan pajak UMKM *offline* maupun *online* dengan menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan kemudian kalikan dengan tarif.
- Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM karena dengan tarif murah, sisa omset bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya.
- Tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang terjun sebagai wirausaha karena tidak perlu khawatir dengan beban pajak yang tinggi.

- Dengan tarif pajak istimewa 0,5% dapat mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak.
- UMKM bisa naik peringkat karena setelah menyusun laporan keuangan dan patuh membayar pajak sebagai salah satu cara untuk mendapatkan akses permodalan lewat bank.

Berdasarkan uraian di atas tidak ada lagi alasan bagi pelaku UMKM untuk mengeluh karena beban pajak yang tinggi atau mengemplang pajak. Sebab peranan pajak UMKM sangat penting bagi pembangunan dan perekonomian nasional. Tarif pajak 0,5% hanya berlaku untuk : 1) UMKM memiliki peredaran bruto (omset) tidak lebih Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak antara lain usaha dagang industri jasa, 2) Berlaku untuk UMKM konvensional atau *offline* maupun yang berjualan di toko *online* (*marketplace* dan media sosial). Penggunaan tarif istimewa pajak UMKM 0,5% ada batas waktunya sesuai PP No. 23 tahun 2018 antara lain : 1) Bagi wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun, 2) Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun, 3) Wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sbb :

- Persamaan regresi linier berganda $Y = 1287372.878 - 1177.219 X_1 - 137818.434X_2 + e$ menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap omset UMKM secara parsial dan simultan.
- Nilai koefisien korelasi $r = 0,910$ berarti inflasi dan suku bunga dengan omset UMKM berhubungan sangat kuat.
- Nilai Adjusted R Square = 80,2% berarti omset UMKM dijelaskan oleh inflasi dan suku bunga 80,2% sedangkan sisanya 19,8% % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Saran yang dapat diberikan sesuai hasil dan pembahasan di atas sebagai berikut :

- Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Padang hendaknya dapat meningkatkan omset UMKM dengan melakukan berbagai inovasi produk.
- Kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi omset UMKM secara mikro dan makro.
- Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambah jumlah data panel penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan tidak bias.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agevli, Bijan and Mohsin S. 1972. Inflationary Finance and the Dynamics of Inflation in Indonesia 1952 – 1972. *American Economic Review*.67(3).
- Bank Indonesia.2018.*Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Damodar, Gujarati. 1995. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer. 1993. Moderate Inflation. *World Bank Economic Review*. 7(1) : 1 – 44
- Dornbusch, Rudinger. 1994. *Macroeconomics. Sixth Edition*. New York : McGraw-Hill.
- Dritsaki, Chaido. 2012. *Inflation, Employment and the NAIRU in Greece*. West London : Brunel University.
- Hafsah, Muhammad. 2014. Upaya Pengembangan UMKM. *Infokop No.25 Tahun XX*.
- Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Bogor : PT Penerbit IPB Press.
- Nofirin. 1992. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPF.
- Phillips, A.W. 2005. The Relation Between Unemployment and the rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdoms 1861 – 1957. *Economica New Series 25(100)* : 283 – 299.

- Prabowo, Hendro dan Wardoyo. 2003. *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Wilayah Jabotabek*. Depok: Universitas Gunadarma.
- Qianyi, Wang. 2013. The Reseach on Inflation Rate in China. *Proceeding of the International Conference on Social Science Research. ICSR of Malaya* : eISBN 978-976-11768-1-8
- Samuelson, Paul dan Nordhaus William. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta :PT Media Edukasi.
- Sekaran, Uma. 2015. *Research Methods for Business. Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Setyowati, Eny. 2003. Uji Kausalitas Granger : Inflasi dan Pengangguran Di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Thoha, Mahmud dan Sukarna. 2006. Pemberdayaan UMKM Melalui Modal Ventura Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan XIV (2)* : 19 – 35.
- Utomo, Fajar Wahyu. 2013. *Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980 – 2010*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.